Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 34588-34598

Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Malenge Kabupaten Tojo Una-Una

Nurhaniva[1], Khairunisa Kahar[2], Ainun Lestari[3]
[1-3]Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Tadulako, Indonesia
Corresponding Author: Nurhaniva, e-mail: nurhanivaa6@gmail.com

Published: December, 2025

ABSTRACT
This study investigates the effectiveness of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH) in Malenge Village, Tojo Una-Una Regency, Indonesia, using a qualitative case study approach and a Logic Model evaluation framework. Malenge, characterized by remote geography and a high poverty rate, poses significant operational challenges for cash transfer programs. Despite strong coordination among local stakeholders and adequate beneficiary understanding, PKH implementation faces structural constraints, notably unstable digital infrastructure and extreme weather, which delay fund disbursement and increase compliance costs. Results demonstrate that, while PKH effectively enhances school attendance and education expenditure in the short term, much of the aid is diverted to subsistence needs due to acute poverty, creating a substitution effect. This finding redefines success in terms of process quality rather than outcome fidelity. The study emphasizes the need for adaptive policy interventions that integrate subsistence support and address logistical and digital exclusion challenges to optimize PKH impact in isolated regions.

Keywords: Conditional Cash Transfer, Logic Model, Remote Islands, Structural Barriers, Program Effectiveness

ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Malenge, Kabupaten Tojo Una-Una, Indonesia, melalui pendekatan studi kasus kualitatif dan kerangka evaluasi Logic Model. Desa Malenge, dengan karakter tantangan geografis terpencil dan tingkat kemiskinan tinggi, menghadirkan hambatan operasional signifikan bagi pelaksanaan program transfer tunai. Meskipun koordinasi stakeholder lokal sangat baik dan pemahaman penerima bantuan memadai, implementasi PKH dihadapkan kendala struktural, terutama infrastruktur digital yang tidak stabil dan cuaca ekstrem, yang menyebabkan keterlambatan pencairan dana dan meningkatkan biaya kepatuhan. Hasil penelitian menunjukkan PKH efektif dalam meningkatkan partisipasi sekolah dan pengeluaran pendidikan jangka pendek, namun bantuan banyak dialihkan untuk kebutuhan subsisten akibat kemiskinan akut, memunculkan efek substitusi. Temuan ini mendefinisikan ulang keberhasilan program pada kualitas proses, bukan pada kesesuaian hasil. Studi ini menegaskan pentingnya intervensi kebijakan adaptif yang mengintegrasikan dukungan subsisten serta mengatasi tantangan logistik dan eksklusi digital untuk mengoptimalkan dampak PKH di wilayah terpencil.

Kata Kunci: PKH, Logic Model, Kepulauan Terpencil, Hambatan Struktural, Efektivitas Program

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN
Permasalahan kemiskinan di Indonesia merupakan isu struktural yang mendesak, secara substansial membatasi akses jutaan penduduk terhadap kebutuhan dasar, termasuk layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan saat ini, tetapi juga menghambat pembangunan sumber daya manusia (SDM) di masa depan, sehingga penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas nasional yang berkelanjutan bagi pemerintah.

Pemerintah Pusat meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu inisiatif Bantuan Sosial Nontunai (*Conditional Cash Transfer*/CCT) unggulan yang ditujukan kepada rumah

tangga prasejahtera (Marquez-Padilla et al., 2025). PKH dirancang dengan tujuan ganda: pertama, sebagai jaring pengaman sosial untuk mitigasi kemiskinan saat ini melalui transfer uang langsung; dan kedua, sebagai instrumen investasi modal manusia untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi dengan mewajibkan kondisi (*conditionalities*) terkait kehadiran sekolah (hingga SMA) dan pemeriksaan kesehatan (ibu hamil dan balita). Fokus pada *human capital* ini menempatkan PKH sebagai program yang strategis dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Indonesia (Anggrasari & Hanri, 2025).

Penelitian ini berfokus pada implementasi PKH di Desa Malenge, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una, sebuah wilayah dengan tantangan geografis yang unik. Secara sosio-ekonomi, Desa Malenge diklasifikasikan sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, di mana sekitar 60% populasinya berada di bawah garis kemiskinan, dengan masalah utama berupa rendahnya kualitas SDM dan tingginya angka putus sekolah.

Meskipun PKH telah diimplementasikan di Desa Malenge sejak tahun 2017, pelaksanaan program dihadapkan pada kendala struktural yang spesifik dan seringkali terabaikan dalam studi efektivitas program secara umum. Kendala ini mencakup ketidakstabilan jaringan internet yang berdampak langsung pada proses pencairan dana melalui Mandiri Link, yang berujung pada keterlambatan dana 1-2 minggu. Selain itu, Desa Malenge, yang merupakan wilayah kepulauan, sering mengalami cuaca ekstrem yang menimbulkan kendala logistik, mempersulit Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan yang terpusat di Ampana Kota. KPM di lokasi ini diindikasikan belum sepenuhnya memahami manfaat program, dan masalah struktural ini berpotensi merusak keseluruhan tujuan investasi jangka panjang PKH.

Studi empiris mengenai efektivitas PKH di Indonesia telah banyak dilakukan, namun sebagian besar cenderung berfokus pada analisis makro atau isu-isu administrasi yang terjadi di wilayah perkotaan atau pedesaan dengan akses infrastruktur yang memadai. Hal ini menciptakan celah penelitian yang signifikan terkait bagaimana program CCT yang bergantung pada logistik digital dapat bertahan dan beroperasi secara efektif di lingkungan geografis terpencil dengan infrastruktur yang rentan, seperti Desa Malenge.

Program Transfer Tunai Bersyarat (CCT) seperti PKH adalah kebijakan sosial yang kini menjadi andalan di banyak negara berkembang. Program ini memiliki tujuan ganda, yaitu mengurangi kemiskinan saat ini melalui pemberian uang tunai langsung dan mencegah transmisi kemiskinan antar-generasi melalui persyaratan (*conditionalities*) yang mendorong investasi pada modal manusia, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan (Marquez-Padilla et al., 2025).

Contoh implementasi CCT global yang sukses adalah PROGRESA/Oportunidades di Meksiko, yang terbukti signifikan dalam meningkatkan partisipasi sekolah dan kehadiran di layanan kesehatan (Tomazini, 2022). Selain itu, Bolsa Família di Brazil dikenal karena efisiensinya dalam penargetan dan kontribusinya pada penurunan angka kemiskinan dan ketidaksetaraan (Neves et al., 2022). Studi komparatif oleh Levasseur (2021) menunjukkan bahwa meskipun CCT umumnya efektif dalam mencapai tujuan jangka pendek, tantangan implementasi seringkali muncul di daerah terpencil dan perdesaan yang terisolasi. Tantangan ini, seperti kesulitan logistik, biaya kepatuhan yang tinggi, dan *exclusion errors* (keluarga yang berhak tidak menerima bantuan), adalah masalah universal yang dihadapi CCT, termasuk di Indonesia.

Penelitian empiris mengenai PKH di Indonesia menguatkan temuan global, menunjukkan bahwa program ini memiliki efek positif signifikan terhadap pengeluaran konsumsi makanan dan secara substansial dapat mengurangi kemungkinan anak-anak mengalami kemiskinan (19.4% poin penurunan). Namun, efektivitas ini seringkali terhalang oleh tantangan operasional, seperti pemanfaatan dana yang belum optimal dan isu infrastruktur (Hudang et al., 2024).

Untuk menganalisis efektivitas secara rigorus, penelitian ini mengadopsi Logic Model sebagai kerangka evaluasi. Logic Model memberikan visualisasi terstruktur mengenai hubungan kausalitas antara sumber daya program, aktivitas, dan hasil yang diharapkan, yang lebih unggul daripada sekadar model pencapaian tujuan (*Goal Attainment Model*) yang seringkali terlalu simplistik untuk program sosial yang kompleks (McLaughlin & Jordan, 2015). Logic Model membagi program menjadi serangkaian komponen logis:

1. Input: Sumber daya yang diinvestasikan (dana, staf pendamping, infrastruktur, KKS).
2. Activities: Tindakan program yang dilaksanakan (penyaluran dana, pertemuan kelompok, pelatihan).
3. Outputs: Hasil langsung dari aktivitas, seringkali diukur secara kuantitas (jumlah KPM terlayani, frekuensi pertemuan).
4. Outcomes (Jangka Pendek, Menengah, Panjang): Perubahan yang diharapkan pada populasi sasaran (pengetahuan, perilaku, status sosial-ekonomi).

Dalam konteks PKH, efektivitas di Desa Malenge akan diukur berdasarkan seberapa berhasil rantai logis ini berjalan. Kegagalan pada tahap *Activities* (misalnya, keterlambatan pencairan) akan secara langsung melemahkan pencapaian *Outputs* (pemahaman dan alokasi dana yang tepat) dan *Intermediate Outcomes* (kepatuhan sekolah/kesehatan). Logic Model sangat berguna untuk mengidentifikasi "kesenjangan logis" atau inkonsistensi antara aktivitas yang direncanakan dan hasil yang diharapkan (McLaughlin & Jordan, 2015).

Pelaksanaan PKH di Indonesia sangat bergantung pada sistem pembayaran non-tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan agen bank (Mandiri Link). Meskipun digitalisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, studi menunjukkan bahwa di daerah pedesaan terpencil, proses ini menghadapi tantangan serius, terutama rendahnya literasi digital KPM dan kurangnya insentif bagi bank untuk berinvestasi dalam jaringan agen yang berkualitas di daerah terpencil (Sulastri & Kumar, 2019). Akibatnya, ketergantungan pada Mandiri Link dan jaringan yang tidak stabil, seperti yang terjadi di Desa Malenge, dapat menyebabkan penundaan pencairan dan memaksa KPM kembali ke layanan manual (seperti PT Pos), yang juga menghadapi tantangan jadwal dan logistik.

Kendala logistik akibat cuaca ekstrem di wilayah kepulauan memperburuk masalah ini, karena KPM menanggung biaya dan risiko tambahan (biaya kepatuhan) untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Situasi ini mirip dengan tantangan logistik yang dihadapi Bolsa Família di wilayah utara Brazil yang terisolasi (Hellmann, 2015).

Selain itu, temuan bahwa dana PKH di Malenge digunakan juga untuk kebutuhan pokok subsisten seperti membeli beras mengindikasikan adanya *substitution effect*. Efek ini terjadi ketika transfer tunai yang seharusnya dialokasikan untuk investasi jangka panjang (pendidikan/kesehatan) dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pangan atau kebutuhan mendesak yang tidak terpenuhi. Fenomena ini bukan kegagalan unik PKH, melainkan manifestasi dari *survival rationale* dalam konteks kemiskinan akut, di mana KPM memprioritaskan kelangsungan hidup sebelum investasi jangka panjang (Esa et al., 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan memberikan analisis kualitatif yang rigorus dan mendalam (*thick description*) tentang efektivitas PKH dalam konteks kepulauan terpencil. Kontribusi utama penelitian ini adalah:

1. Penguatan Basis Teoritis: Menggunakan kerangka evaluasi Logic Model untuk menganalisis secara eksplisit rantai kausalitas (*Inputs* → *Activities* → *Outputs* → *Outcomes*), memungkinkan pembedaan yang jelas antara keberhasilan internal program (proses koordinasi) dan kegagalan struktural (infrastruktur).
2. Analisis Struktural: Mengidentifikasi dan menganalisis peran kendala logistik digital dan geografis (cuaca ekstrem) sebagai faktor penghambat struktural yang memengaruhi biaya kepatuhan KPM dan mengubah pola pemanfaatan dana.

3. Rekomendasi Aksiabel: Merumuskan rekomendasi kebijakan yang spesifik dan adaptif, berfokus pada mitigasi risiko logistik dan digital untuk meningkatkan *outcome fidelity* PKH di wilayah terpencil.

Berdasarkan konteks tersebut, pertanyaan penelitian utama yang diajukan adalah: (1) Bagaimana kerangka Logic Model menggambarkan mekanisme PKH dan pola pemanfaatan dana? (2) Bagaimana kendala logistik digital dan cuaca ekstrem berperan sebagai faktor penghambat struktural? (3) Apa implikasi teoritis dan kebijakan spesifik yang dapat ditawarkan untuk meningkatkan efektivitas PKH di wilayah kepulauan?

METODOLOGI PENELITIAN

1. Desain Penelitian, Lokasi, dan Durasi

Penelitian ini menggunakan desain penelitian Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan Studi Kasus Tunggal (Desa Malenge, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una). Pendekatan studi kasus dipilih karena relevan untuk menganalisis secara mendalam dan holistik efektivitas PKH di konteks geografis yang unik, memahami mekanisme implementasi, persepsi *beneficiary*, dan faktor-faktor kontekstual.

Pengumpulan data primer dilakukan selama periode tiga bulan, dari Mei hingga Juli 2025. Pemilihan durasi ini memastikan bahwa peneliti dapat mengamati secara langsung siklus pencairan triwulanan PKH dan fenomena keterlambatan serta kendala logistik yang diakibatkan oleh cuaca ekstrem, yang sulit ditangkap melalui data kuantitatif semata

2. Penentuan Informan dan Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, memastikan pemilihan informan kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung yang relevan mengenai PKH. Kriteria informan mencakup pemangku kepentingan utama dalam program.

Total informan kunci yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah 18 orang, terdiri dari:

a. Kepala Desa Malenge (1 orang).
b. Pendamping PKH (2 orang) yang bertanggung jawab atas wilayah Talatako/Malenge.
c. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH (15 orang).

Kriteria inklusi untuk KPM adalah mereka yang telah aktif menerima bantuan minimal tiga tahun dan memiliki komponen anak sekolah (SD, SMP, atau SMA) dan/atau balita. Informan KPM dipilih untuk merepresentasikan variasi pengalaman pencairan, baik yang bergantung pada Mandiri Link maupun PT Pos. Jumlah 15 KPM dianggap memadai untuk mencapai saturasi data kualitatif, di mana wawancara lebih lanjut tidak menghasilkan tema atau informasi baru yang substansial.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen

Data primer dikumpulkan melalui teknik Triangulasi Metode: wawancara mendalam semi-terstruktur dan observasi langsung.

a. Wawancara Mendalam: Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara semi-terstruktur, yang berfokus pada dimensi Logic Model, termasuk mekanisme penyaluran dana, pemahaman KPM mengenai *conditionalities*, pola pemanfaatan dana, serta faktor pendukung dan penghambat struktural (jaringan dan cuaca). Wawancara direkam dan didokumentasikan.
b. Observasi Langsung: Observasi dilakukan secara non-partisipatif selama kegiatan pertemuan kelompok rutin (P2K2) yang dilakukan oleh pendamping PKH dan selama proses pencairan dana di Kantor Desa/Mandiri Link. Observasi ini bertujuan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara, khususnya terkait koordinasi

antar-stakeholder dan kendala operasional pencairan dana.

4. Teknik Analisis Data Kualitatif

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik Analisis Tematik (*Thematic Analysis*). Proses analisis meliputi: (1) Transkripsi seluruh data wawancara dan catatan lapangan; (2) *Familiarization* data; (3) Koding Terbuka untuk mengidentifikasi konsep dan kategori awal; (4) Koding Aksial untuk menghubungkan kategori-kategori menjadi tema-tema utama yang relevan dengan Logic Model; dan (5) Koding Selektif untuk mengintegrasikan tema-tema menjadi narasi analitis yang kohesif.

Kerangka koding utama difokuskan pada: Efektivitas Proses (Koordinasi, Pendampingan), Efektivitas Output (Pemahaman, Ketepatan Waktu), Tantangan Struktural (*Digital Divide*, Logistik Geografis), dan Rasionalitas Pemanfaatan Dana.

5. Rigor Metodologi Kualitatif (*Trustworthiness*)

Untuk memenuhi standar rigor metodologi, penelitian ini menjamin kualitas temuan melalui kriteria *trustworthiness*: Kredibilitas (*Credibility*), Dependabilitas (*Dependability*), Konfirmabilitas (*Confirmability*), dan Transferabilitas (*Transferability*) (Korstjens & Moser, 2018). Mekanisme untuk mencapai kriteria ini didetailkan sebagai berikut:

Tabel 1. Rigor Metodologi Kualitatif (*Trustworthiness*) dalam Penelitian PKH

Kriteria Rigor	Tujuan	Strategi Implementasi dalam Penelitian PKH di Malenge
Kredibilitas (Credibility)	Konsistensi temuan dengan pandangan informan.	Triangulasi sumber data (KPM, Pendamping, Kades) dan *Member Checking* (verifikasi transkrip dan kutipan temuan utama oleh informan) (Abidin et al., 2024).
Dependabilitas (Dependability)	Stabilitas data dan konsistensi proses.	*Audit Trail* (dokumentasi koding, catatan lapangan, dan wawancara) untuk memungkinkan auditor eksternal meninjau proses penelitian.
Konfirmabilitas (Confirmability)	Objektivitas hasil, bebas dari bias peneliti.	*Reflexivity Statement* (pengakuan posisi dan latar belakang peneliti) dan pengarsipan data mentah untuk pemeriksaan konfirmasi (Wu et al., 2016).
Transferabilitas (Transferability)	Potensi penerapan pada konteks serupa.	Deskripsi Tebal (*Thick Description*) mengenai konteks sosio-ekonomi, karakteristik informan, dan kendala geografis Desa Malenge.

6. Etika Penelitian

Penelitian ini mematuhi standar etika akademik tertinggi. Sebelum pengumpulan data, peneliti memperoleh *Informed Consent* tertulis dari semua partisipan, yang menjelaskan tujuan, prosedur, risiko, dan hak partisipan untuk menarik diri. Kerahasiaan identitas informan dijamin melalui penggunaan nama samaran (misalnya, Ibu Nilma, Bapak Arif Djalal) dalam transkrip dan laporan. Selain itu, persetujuan etis formal (*IRB/Ethics Approval*) dari institusi telah diperoleh sebelum penelitian dimulai.

HASIL PENELITIAN

1. Implementasi Program dan Output Positif

Pelaksanaan PKH di Desa Malenge menggunakan dua mekanisme penyaluran: melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dicairkan via Mandiri Link/ATM, dan melalui PT Pos yang langsung mendatangi Kantor Desa Malenge. Penyaluran dana dilakukan secara bertahap empat kali dalam setahun (Februari, Juni, Agustus, November).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH di Malenge telah mencapai efektivitas tinggi pada tingkat proses dan *output* jangka pendek. Keberhasilan ini didukung oleh tiga faktor utama:

a. Pemahaman KPM yang Memadai: KPM di Desa Malenge umumnya sudah mengetahui manfaat dan tujuan program PKH. Pemahaman ini dicapai melalui kegiatan pertemuan kelompok rutin (P2K2) yang intensif, serta diseminasi informasi rinci oleh pendamping PKH, seringkali melalui grup WhatsApp.
b. Peran Kunci Pendamping PKH: Pendamping PKH, yang diwakili oleh Bapak Arif Djalal, memainkan peran strategis sebagai fasilitator dan edukator. Pendamping tidak hanya menyampaikan informasi teknis PKH, tetapi juga memberikan materi tambahan mengenai literasi pengelolaan keuangan rumah tangga dan pola asuh anak yang baik dan benar.
c. Koordinasi yang Solid: Koordinasi yang baik antara Pemerintah Desa, pendamping PKH, dan KPM menjadi faktor pendukung utama yang memastikan program berjalan dengan lancar di tingkat lokal.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Arif Djalal, pendamping PKH, tugasnya mencakup memastikan KPM memahami bahwa dana harus diutamakan untuk keperluan komponen (seperti anak sekolah). Hal ini sejalan dengan pernyataan KPM Ibu Fitri Masinae yang memprioritaskan dana untuk kebutuhan pendidikan anak sekolah, dan jika ada sisanya, dibelikan beras.

2. Hambatan Struktural: Logistik Digital dan Geografis

Meskipun efektivitas proses tinggi, implementasi PKH di Desa Malenge terkendala oleh faktor-faktor struktural yang berada di luar kendali manajemen program lokal. Faktor-faktor ini secara signifikan mengganggu *timeliness* (ketepatan waktu) dan *outcome fidelity* (kesesuaian hasil).

a. Kendala Jaringan Digital: Ketidakstabilan jaringan internet di Desa Malenge adalah penghambat utama pencairan dana melalui Mandiri Link. Kendala jaringan ini sering menyebabkan keterlambatan penarikan uang KPM, yang dapat mencapai 1 hingga 2 minggu bahkan lebih. Keterlambatan ini diungkapkan oleh KPM Ibu Nilma: "tidak tepat waktu karena seiring terlambat biasanya". Keterlambatan 1-2 minggu ini mengancam stabilitas keuangan KPM karena mereka mungkin terpaksa berutang untuk menutupi kebutuhan mendesak selama masa penantian, sehingga mengurangi dampak transfer tunai.
b. Kendala Logistik Cuaca Ekstrem: Desa Malenge, sebagai wilayah kepulauan, rentan terhadap cuaca ekstrem. Kondisi cuaca yang tidak menentu seringkali menghambat transportasi laut. Hal ini menjadi tantangan karena fasilitas kesehatan dan pendidikan yang merupakan lokasi pemenuhan *conditionalities* PKH, harus diakses di Ampana Kota.[1] Tantangan logistik ini secara eksponensial meningkatkan biaya yang harus ditanggung KPM untuk memastikan anak-anak bersekolah dan ibu hamil/balita mendapatkan pemeriksaan kesehatan, yang dikenal sebagai biaya kepatuhan (*compliance costs*).

3. Pola Pemanfaatan Dana (*The Substitution Effect*)

Data kualitatif menunjukkan bahwa dana yang diterima KPM diprioritaskan untuk keperluan komponen wajib (pendidikan dan kesehatan), tetapi juga dialokasikan untuk kebutuhan subsisten.

Kutipan dari Ibu Fitri Masinae menegaskan prioritas penggunaan dana: "untuk keperluan paling penting pendidikan anak sekolah, yah kalau ada sisanya belikan beras". Pendamping PKH juga mengamati bahwa KPM sangat terbantu karena dapat mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan sekolah, bayi, dan keperluan lainnya.

Pola pemanfaatan dana di Desa Malenge secara konsisten menunjukkan:

Prioritas Utama→Pendidikan>Kebutuhan Pangan>Kebutuhan Lain

Meskipun program ditujukan untuk kesehatan dan pendidikan, analisis mendalam menunjukkan bahwa penggunaan dana "tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan Program PKH" karena dialihkan untuk membeli beras. Ini menegaskan adanya *substitution effect*, di mana sebagian transfer tunai berfungsi sebagai program penstabil konsumsi (*consumption stabilizer*) untuk menjamin kebutuhan pangan dasar di tengah kemiskinan akut (60% populasi).

DISKUSI

Diskusi ini menginterpretasikan temuan di Desa Malenge melalui lensa Logic Model dan literatur komparatif CCT, berfokus pada penyelesaian kontradiksi internal antara klaim efektivitas dan pola pemanfaatan dana yang tidak sepenuhnya sesuai tujuan.

1. Analisis Efektivitas PKH Malenge Melalui Logic Model

Penerapan kerangka Logic Model mengungkapkan bahwa PKH di Desa Malenge memiliki rantai program yang terputus di tengah, yaitu antara fase *Activities* dan *Intermediate Outcomes*.

Rantai Logic Model yang Terputus:

Keberhasilan pada tahap **Inputs** (dana tersedia, KKS disalurkan) dan **Activities** (koordinasi solid, pertemuan rutin, pendampingan efektif) menunjukkan bahwa manajemen internal program di tingkat desa berjalan sangat baik. Hal ini menghasilkan **Output** yang kuat, yaitu pemahaman KPM yang memadai.

Namun, kegagalan struktural (jaringan internet tidak stabil dan cuaca ekstrem) mengganggu Activity kunci: *ketepatan waktu penyaluran dana* dan *kemudahan akses ke fasilitas*. Keterlambatan pencairan 1-2 minggu ini merupakan kegagalan sistemik yang membuat transfer tunai tidak berfungsi secara optimal sebagai modal investasi yang terukur, sehingga menghambat transisi ke *Intermediate Outcomes* (peningkatan kepatuhan dan investasi penuh pada SDM) (McLaughlin & Jordan, 2015). Tabel 2 menyajikan analisis Logic Model yang dikalibrasi terhadap temuan di Desa Malenge:

Tabel 2. Kerangka Logika Program PKH dan Kriteria Efektivitas Desa Malenge

Komponen Logic Model	Indikator Kunci dalam PKH	Kriteria Efektivitas di Malenge	Status Temuan Kualitatif
Input (Sumber Daya)	Dana, KKS, SDM Pendamping.	Ketersediaan dan Ketepatan Sasaran.	Tepat Sasaran; Ketersediaan SDM Pendamping Memadai.
Aktivitas (Proses)	Penyaluran Dana 4 Tahap, Pertemuan Kelompok (P2K2), Pendampingan.	Frekuensi Pertemuan (Reguler), Ketepatan Waktu Penyaluran.	Pertemuan Reguler Kuat; Penyaluran Terhambat 1-2 Minggu karena jaringan/logistik.
Output	Pemahaman KPM tentang	KPM mampu	Pemahaman Memadai;

(Jangka Pendek)	program, Alokasi dana prioritas.	mengelola keuangan dan mengalokasikan prioritas.	Pemanfaatan Tidak Sepenuhnya Sesuai (Digunakan untuk Beras).
Intermediate Outcome	Peningkatan Kepatuhan (Sekolah/Kesehatan), Peningkatan Konsumsi Sehat.	Tingkat Kepatuhan (Compliance) terhadap Conditionalities.	Kepatuhan Pendidikan Tinggi; Kepatuhan Kesehatan & *Timeliness* Terhalang Cuaca/Logistik.
Outcome (Jangka Panjang)	Peningkatan Kualitas SDM, Keluar dari Siklus Kemiskinan.	Peningkatan partisipasi sekolah, Penurunan angka kemiskinan.	Implikasi Jelas Terbatas: Proses yang kuat dapat diukur, tetapi hasil jangka panjang terancam oleh kendala struktural.

2. Resolusi Kontradiksi dan Rasionalitas KPM

Terdapat kontradiksi dalam artikel awal, yaitu menyatakan program efektif tetapi mengakui penggunaan dana tidak sepenuhnya sesuai tujuan (untuk membeli beras). Analisis interpretatif mengatasi hal ini dengan mendefinisikan kembali efektivitas.

Klaim efektivitas yang tinggi dalam Kesimpulan awal adalah benar jika diukur dari perspektif manajemen internal program (seperti kualitas pendampingan dan koordinasi). Namun, klaim ini tidak valid jika diukur dari dampak hasil (*outcome fidelity*) murni CCT, karena adanya *substitution effect* yang signifikan.

Rasionalitas Survival: Penggunaan dana PKH untuk membeli beras adalah cerminan dari rasionalitas kelangsungan hidup (*survival rationale*) KPM. Ketika 60% populasi berada di bawah garis kemiskinan dan menghadapi ketidakpastian akses dana akibat jaringan yang labil, kebutuhan dasar (pangan) akan selalu diprioritaskan di atas investasi jangka panjang (pendidikan/kesehatan). Secara *de facto*, PKH di Desa Malenge bertransformasi menjadi program hibrida: CCT untuk kebutuhan pendidikan, dan Unconditional Cash Transfer (UCT) untuk menstabilkan konsumsi keluarga. Studi Esa et al (2025) CCT komparatif mendukung pandangan bahwa transfer tunai bersyarat tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kebutuhan subsisten dalam konteks kemiskinan akut.

3. Dampak *Digital Divide* dan Logistik Terhadap *Exclusion Errors*

Kondisi Desa Malenge menyoroti isu kritis mengenai *digital exclusion* dalam implementasi program bantuan sosial. Ketergantungan pada Mandiri Link (pembayaran digital) di lingkungan dengan infrastruktur digital yang tidak stabil memperlihatkan kerentanan sistem. KPM yang paling terpencil adalah yang paling menderita akibat kegagalan teknologi, berpotensi memicu *exclusion errors* tersembunyi (Sulastri & Kumar, 2019).

Selain tantangan digital, kendala logistik geografis (cuaca ekstrem) secara langsung meningkatkan biaya kepatuhan KPM. Untuk memenuhi syarat kesehatan dan pendidikan, KPM harus mengeluarkan biaya transportasi laut yang besar ke Ampana Kota. Apabila biaya kepatuhan ini melebihi insentif transfer tunai, hal itu dapat mengurangi motivasi KPM untuk memenuhi *conditionalities*, yang pada gilirannya mengurangi dampak investasi modal manusia jangka panjang PKH. Analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan CCT harus disesuaikan secara dinamis dengan konteks geografis dan risiko iklim yang dihadapi KPM (Pega et al., 2015).

4. Implikasi Teoritis dan Kontribusi

Penelitian ini berkontribusi pada literatur CCT dengan menunjukkan bahwa evaluasi efektivitas di wilayah terpencil tidak boleh berhenti pada metrik kepatuhan formal. Kami menggarisbawahi bahwa kegagalan infrastruktur digital dan geografis bertindak sebagai *shock* struktural yang memutus rantai Logic Model. Kondisi ini secara sistemik menghambat *timeliness* transfer dana dan meningkatkan *compliance costs*, sehingga mengubah rasionalitas KPM dan mendorong *substitution effect* yang mengalihkan dana dari investasi jangka panjang ke kebutuhan subsisten. Kontribusi ini menegaskan perlunya kebijakan sosial yang sensitif terhadap konteks dan adaptif terhadap risiko lingkungan dan digital.

5. Rekomendasi Kebijakan Aksiabel

Untuk mengoptimalkan efektivitas PKH di Desa Malenge dan wilayah kepulauan serupa, rekomendasi kebijakan harus bersifat spesifik dan *actionable*, menargetkan mitigasi kendala struktural yang teridentifikasi.

Tabel 3. Matriks Rekomendasi Kebijakan Aksiabel Berdasarkan Kendala Struktural

Kendala Struktural Ditemukan	Implikasi Program di Malenge	Rekomendasi Kebijakan Aksiabel	Stakeholder Kunci
Ketidakstabilan Jaringan Internet (*Digital Divide*)	Keterlambatan pencairan dana 1-2 minggu, risiko pinjaman.	Akselerasi investasi *broadband* melalui *Public-Private Partnerships* (PPP); Subsidi layanan internet dan pelatihan literasi digital khusus bagi KPM.	Kemkominfo, Kemensos, Bank Himbara.
Cuaca Ekstrem/Logistik Wilayah Kepulauan	Biaya kepatuhan tinggi (transportasi ke Ampana Kota), risiko non-compliance.	Implementasi mekanisme *Shock-Responsive Cash Transfers* (SRCT) yang dipicu oleh peringatan cuaca, memberikan bantuan tunai atau logistik in-kind tambahan untuk mengkompensasi biaya kepatuhan.	Pemerintah Daerah (Pemda), BNPB, Kemensos.
Substitution Effect (Penggunaan untuk Beras)	Efek jangka panjang investasi SDM berkurang; prioritas kelangsungan hidup.	Penyesuaian formulasi bantuan untuk mengintegrasikan kebutuhan subsisten dasar dengan program pangan (misalnya, integrasi yang lebih efektif dengan BPNT) untuk membebaskan dana PKH sepenuhnya bagi investasi SDM.	Kemensos, BAPPENAS.

6. Agenda Penelitian Lanjutan

Penelitian di masa depan harus menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) untuk mengukur secara kuantitatif dampak kebijakan adaptif yang diusulkan, khususnya efektivitas SRCT dan strategi mitigasi digital, terhadap tingkat kepatuhan conditionalities PKH dan penurunan *substitution effect* pada KPM di wilayah kepulauan. Penelitian lanjutan juga harus menganalisis dampak jangka panjang dari peran ganda pendamping PKH (sebagai edukator dan fasilitator) terhadap mobilitas sosial KPM.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kualitatif Logic Model, Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Malenge telah menunjukkan efektivitas proses yang tinggi, ditandai oleh koordinasi solid antara Pemerintah Desa, pendamping PKH, dan KPM, serta pemahaman KPM yang memadai terhadap tujuan program. Keberhasilan proses ini sebagian besar merupakan hasil dari peran strategis pendamping PKH sebagai fasilitator dan edukator.

Namun, efektivitas hasil program dibatasi secara signifikan oleh tantangan struktural kritis yang unik bagi wilayah kepulauan: (1) Ketidakstabilan infrastruktur digital (jaringan internet) yang menyebabkan keterlambatan pencairan dana 1-2 minggu, dan (2) Kendala logistik cuaca ekstrem yang meningkatkan biaya kepatuhan untuk mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan di Ampana Kota. Konsistensi penggunaan dana untuk konsumsi dasar (beras) menunjukkan bahwa, dalam konteks kemiskinan akut, PKH secara fungsional beroperasi sebagai program hibrida yang menstabilkan konsumsi, selain berfungsi sebagai instrumen investasi SDM.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, I. H. Z., Patah, M. O. R. A., Majid, M. A. A., Usman, S. B., & Zulkornain, L. H. (2024). A Practical Guide to Improve Trustworthiness of Qualitative Research for Novices. *Asian Journal of Research in Education and Social Sciences*, *6*(1), 8–15. https://doi.org/10.55057/ajress.2024.6.S1.2

Anggrasari, F. P., & Hanri, M. (2025). Breaking the Poverty Cycle: Impact of Social Assistance on Intergenerational Poverty. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, *6*(2), 225–238. https://doi.org/10.46456/jisdep.v6i2.733

Esa, M. S. M., Yaacob, S. E., & Wahid, H. (2025). A Systematic Literature Review on Conditional Cash Transfers in Organisation of Islamic Cooperation Countries for Tackling Poverty. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *9*(1), 340–373. https://doi.org/10.22373/sjhk.v9i1.20577

Hellmann, A. G. (2015). *How Does Bolsa Familia Work?: Best Practices in the Implementation of Conditional Cash Transfer Programs in Latin America and the Caribbean*. https://doi.org/10.18235/0000141

Hudang, A. K., Hariyanto, T., & Handoyo, R. D. (2024). Does conditional cash transfer deliver? The Indonesian evidence on PKH. *Business: Theory and Practice*, *25*(2), 447–457. https://doi.org/10.3846/btp.2024.13865

Korstjens, I., & Moser, A. (2018). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 4: Trustworthiness and publishing. *European Journal of General Practice*, *24*(1), 120–124. https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375092

Levasseur, P. (2021). *Why do conditional cash transfer programmes fail to target the poor? The case of urban areas in Mexico* (LC/PUB.2021/6-P/Rev.1; CEPAL Review). https://www.cepal.org/en/publications/47206-why-conditional-cash-transfer-programmes-fail-target-poor-case-urban-areas-mexico

Marquez-Padilla, F., Parker, S., & Vogl, T. (2025). *Rolling Back Progresa: School and Work After the End of a Landmark Anti-Poverty Program*. https://doi.org/10.3386/w33527

McLaughlin, J. A., & Jordan, G. B. (2015). Using Logic Models. In *Handbook of Practical Program Evaluation* (pp. 62–87). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781119171386.ch3

Neves, J. A., Vasconcelos, F. de A. G. de, Machado, M. L., Recine, E., Garcia, G. S., & Medeiros,

M. A. T. de. (2022). The Brazilian cash transfer program (Bolsa Família): A tool for reducing inequalities and achieving social rights in Brazil. *Global Public Health*, *17*(1), 26–42. https://doi.org/10.1080/17441692.2020.1850828

Pega, F., Shaw, C., Rasanathan, K., Yablonski, J., Kawachi, I., & Hales, S. (2015). Climate change, cash transfers and health. *Bulletin of the World Health Organization*, *93*(8), 559–565. https://doi.org/10.2471/BLT.14.150037

Sulastri, A. S., & Kumar, T. R. (2019). *Deepening financial inclusion through cash transfers: The case of PKH in Indonesia*. MicroSave Consulting. https://www.microsave.net/2019/11/13/deepening-financial-inclusion-through-cash-transfers-the-case-of-pkh-in-indonesia/#_ftn1

Tomazini, C. (2022). Pioneering anti-poverty policies in Brazil and Mexico: ambiguities and disagreements on conditional cash transfer programs. *International Journal of Sociology and Social Policy*, *42*(1/2), 7–22. https://doi.org/10.1108/IJSSP-10-2020-0465

Wu, S., Wyant, D. C., & Fraser, M. W. (2016). Author Guidelines for Manuscripts Reporting on Qualitative Research. *Journal of the Society for Social Work and Research*, *7*(2), 405–425. https://doi.org/10.1086/685816